

ORGANISASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Lilik Aslichati (lilik@ut.ac.id)
Universitas Terbuka

ABSTRACT

This study aims to assess the effectiveness of PKK as a means of empowering women to achieve the Millennium Development Goals (MDG's). Research sites are the PKK of Pasar Minggu district, South Jakarta and the PKK of Ciputat district, South Tangerang city. The results showed that PKK is an organization that is potentially a means of empowerment and equal participation of women in development effectively. All of work programs are oriented to the empowerment of women, although implementation is still in top down orientation, not bottom up as expected. The PKK is also only able to empower female members only, not to have an impact on the empowerment of women non-members. Nevertheless the benefits are felt by the surroundings community, especially the Posyandu programs for the toddlers and the elderlies. The targeted, measurable, and intensive trainings as well as support from the local governments are still required in order to empower women through the PKK.

Key words: organization of PKK, women empowerment

Kajian perempuan yang berfokus pada pengalaman perempuan beserta masalah-masalah yang dihadapi sudah banyak dilakukan baik yang bersifat interdisipliner maupun yang orientasinya mengarah kepada kegiatan konkrit. Kajian dan evaluasi mengenai kegiatan konkrit perempuan dalam organisasi yang bertujuan mewujudkan pemberdayaan dan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masih sangat terbuka dan perlu dilakukan secara terus menerus.

Selama lebih dari dua dasa warsa, pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan perempuan yang hasilnya terlihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan. M Biro Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita (2007) peningkatan tersebut masih belum sebagaimana diharapkan, yaitu terwujudnya keadilan dan keselarasan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Guna meningkatkan kualitas SDM perempuan Indonesia dan mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemerintah telah membentuk berbagai program dan sarana yang dapat membantu; salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini telah diakui oleh masyarakat, bahkan pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga internasional (WHO, Unicef, Unesco, dan sebagainya) karena melalui 10 program pokoknya PKK telah mampu melibatkan perempuan (dan laki-laki) dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri (Sejarah PKK, 2007).

Menurut sejarahnya, PKK semula merupakan akronim dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui program pendidikan

perempuan. Kemudian, pada tanggal 27 Desember 1972 organisasi tersebut berubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk membina dan membangun keluarga di bidang mental, spiritual dan fisik serta peningkatan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup. Anggotanya adalah tokoh/pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas/Jawatan dan isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dan semangat otonomi daerah, sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Sejarah PKK, 2007). Kata pemberdayaan perempuan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan kemudian dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1999).

Dari sisi programnya, PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan perempuan kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sasarannya ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan (Biro Pemberdayaan Perempuan Kementerian Peranan Wanita, 2007). Hal tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Deklarasi Milenium yang ditandatangani dalam *United Nations Millenium Summit* di New York Amerika tahun 2000. Tujuan Pembangunan Milenium yang harus dicapai tahun 2015 antara lain adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Menurut Arifonang (dalam Ithromi, et al, 2000:142-143) pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK mempunyai 10 program kerja yang merefleksikan kebutuhan dasar manusia Indonesia, yaitu: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2) gotong royong, 3) pangan, 4) sandang, 5) perumahan dan tatalaksana rumah tangga, 6) pendidikan dan keterampilan, 7) kesehatan, 8) pengembangan kehidupan berkoperasi, 9) kelestarian lingkungan hidup, 10) perencanaan sehat.

Program Kerja PKK tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok program, yakni :

- a. Program Pokok: memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan sebutan 10 Program Pokok PKK.

- b. Program Prioritas (5 tahun): disebut juga Program Keutamaan, adalah kumpulan program yang merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak.
- c. Program Kerja Tahunan: adalah kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program prioritas untuk kurun satu tahun anggaran yang pelaksanaannya dapat merupakan kegiatan Tim Penggerak PKK sendiri atau pun kegiatan unit atau instansi yang dikerjasamakan dengan Tim Penggerak PKK. Tim Penggerak PKK adalah pengelola gerakan PKK yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan yang tugasnya mengelola dan menggerakkan kegiatan PKK; diketuai oleh isteri pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional.

Adapun penanggungjawab pelaksanaan program pokok PKK adalah 5 (lima) kelompok kerja (Pokja) yang bersifat koordinatif satu sama lain, yaitu:

- a. Pokja I, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong.
 - b. Pokja II, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan.
 - c. Pokja III, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang serta perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
 - d. Pokja IV, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
 - e. Pokja V, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kehidupan berkoperasi.
- (10 Program Pokok PKK, 2008).

Sumber pembiayaan organisasi PKK adalah swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Bantuan pemerintah dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat (*top-down policy*) yang diarahkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dan pengurus PKK merupakan isteri-isteri para pejabat wilayah setempat (untuk daerah Provinsi/Kota/Kabupaten) dan isteri-isteri pejabat Kemendagri, yang berperan sebagai anggota *ex-officio*, baik sebagai pembina maupun pelindung di tingkat nasional. Masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi sampai dengan Tingkat Kelurahan tergantung pada masa jabatan suami masing-masing.

Perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia dan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, berdampak pada perkembangan dan pelaksanaan operasional PKK. Tuntutan akan fleksibilitas PKK untuk menjadi agen pembangunan dan agen perubahan semakin kuat. Munculnya krisis ekonomi global dan lingkungan hidup (*eco system*) yang harus diatasi oleh pemerintah, menjadikan organisasi PKK sebagai agen pembangunan dan agen perubahan terdepan terutama dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Kiprah PKK di lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu ikon bergeraknya *civil society* dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan lebih terasakan efektivitasnya dengan adanya kader-kader yang menjangkau sampai di tingkat Desa/Kelurahan. Dengan kuatnya gerakan pemberdayaan keluarga

dan perempuan di tingkat akar rumput, maka pelaksanaan pembangunan partisipatif khususnya dalam masyarakat kota akan mempunyai *added-value* yang signifikan.

Di tingkat provinsi, peran PKK sebagai forum pemberdayaan keluarga secara terpadu yang bisa berperan dan dibutuhkan untuk mendampingi rakyat banyak, semakin mantap. Organisasi PKK di wilayah DKI misalnya, telah membentuk Tim tingkat RW sebagai wahana komunikasi, informasi, pemberdayaan dan advokasi Pembangunan pada tingkat RW. Sebagai bagian dari pemerintah DKI Jakarta, PKK di Kecamatan Pasar Minggu yang terletak di Jakarta Selatan sudah melaksanakan program-program kerja yang disesuaikan dengan program kerja tingkat provinsi. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Kecamatan Ciputat dan kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sebagai daerah "pinggiran" namun masih bersinggungan dengan batas wilayah DKI Jakarta, organisasi PKK di kedua kecamatan tersebut tentunya mempunyai kondisi yang berbeda karena berada di wilayah yang masih bernuansa "urban", dibandingkan dengan PKK Kecamatan Pasar Minggu yang sudah bernuansa metropolitan.

Kondisi inilah yang mendorong dilakukannya penelitian yang berperspektif gender ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (Siti Hadiati Amal, dalam Ithromi, 1995). Selain data primer yang dikumpulkan dengan cara tersebut, juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang berupa UU dan peraturan-peraturan yang berlaku yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program kerja PKK. Data primer disinerjikan dengan data sekunder kemudian dilakukan interpretasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh simpulan yang benar dan rekomendasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar kondisi lapangan yang berbeda karakternya, penyajian dibagi menurut lokasi pengambilan sampel, yaitu Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Ciputat, serta Pondok Aren pada bagian kedua.

- **Kecamatan Pasar Minggu**

Sampel yang diambil adalah anggota PKK (pengurus dan anggota) yang aktif terlibat langsung dalam kegiatan PKK di 4 (empat) RW dengan jumlah responden 29 orang yang berusia 24 tahun sampai dengan 65 tahun dengan jumlah terbanyak pada usia tengah baya yaitu antara usia 38 tahun sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota PKK yang aktif dalam kegiatan tergolong pada usia produktif. Pendidikan responden adalah S1 (13.79%), SLTA (68.97%), SLTP (6.87%), dan SD (10.34%). Hal ini berarti bahwa anggota PKK tidak ada yang buta huruf sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam menanggapi informasi dan mempelajari hal-hal baru. Sekitar 90% responden berstatus tidak bekerja, yang berarti kegiatan PKK bermanfaat untuk mengisi waktu luang mereka atau sebaliknya dari sisi waktu, mereka mempunyai cukup waktu untuk aktif dalam kegiatan PKK.

Di kelurahan Jatipadang maupun kelurahan Pasar Minggu, sudah terbentuk 5 (lima) Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK, dan saat ini kegiatannya sudah berjalan baik dan terlaksana sesuai program kerja dari pusat (Walikota Jakarta Selatan). Setiap Pokja memiliki jumlah dan susunan pengurus yang sama mengikuti ketentuan dari pusat. Kegiatan yang paling menonjol dan dirasakan secara langsung manfaatnya bagi warga atau masyarakat di kecamatan Pasar Minggu adalah kegiatan pendidikan, pelestarian lingkungan dan kesehatan. Di bidang pendidikan kegiatan yang menonjol adalah pendidikan keterampilan dan tata laksana rumah tangga. Kegiatan ini mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga beberapa anggota

PKK. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di beberapa RW sangat membantu orang tua dalam pengasuhan anak, khususnya anak-anak balita dalam bentuk pendidikan pra sekolah. Di bidang pelestarian lingkungan, aktivitas yang menonjol adalah berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Hasil yang dicapai dengan memberdayakan perempuan adalah kegiatan pembuatan kompos dari bahan sampah organik yang hasilnya dijual di kios PKK RW01 kelurahan Pasar Minggu dan mampu mengantar lingkungan mereka meraih kejuaraan sebagai pemenang pertama lomba Jakarta *Green and Clean* tingkat DKI tahun 2009. Di bidang kesehatan, kegiatan yang menonjol adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) bagi Balita dan Lansia. Kegiatan lain yang berkaitan erat dengan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang berjalan dengan baik di semua RW kecamatan Pasar Minggu adalah pemeriksaan jentik-jentik nyamuk secara berkala, olah raga atau senam, kebersihan lingkungan, sampai dengan program layanan kesehatan masyarakat yang dikenal dengan "dokter masuk desa".

Kegiatan yang belum berjalan sebagaimana diharapkan adalah pembangunan kehidupan berkoperasi, karena masih terbatas pada kegiatan simpan pinjam saja yang dilakukan pada acara arisan bulanan. Jumlah pinjamannya pun terbatas, maksimal seratus ribu rupiah; jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan anggota untuk modal usaha. Demikian pula program sandang dan dasa wisma, relatif tidak terlihat kegiatannya. Hanya satu RW di kelurahan Pasar Minggu melaksanakan dasa wisma, itu pun dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras sebagaimana ketentuan programnya.

- **Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pondok Aren**

Pengumpulan data di Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pondok Aren dilakukan lebih banyak melalui diskusi kelompok dan pengamatan di lapangan pada kegiatan yang sedang berjalan, seperti Posyandu, majelis Ta'lim dan PAUD. Responden adalah pengurus dan kader PKK yang berusia antara 30 tahun sampai dengan 55 tahun, dengan tingkat pendidikan paling tinggi sarjana (S1), dan paling rendah adalah SD. Jumlah terbanyak adalah lulusan SLTA. Status pekerjaan terbanyak adalah tidak bekerja dan atau pensiunan (82%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di daerah ini lebih banyak diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga. Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa pengurus dan anggota PKK yang berada di luar kompleks perumahan lebih aktif dibanding yang ada di kompleks perumahan.

Kegiatan PKK Kecamatan Ciputat belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan PKK. Dari 5 Pokja yang seharusnya, baru beberapa Pokja yang melakukan kegiatannya, yaitu Pokja I, Pokja II dan Pokja IV. Hal ini terjadi karena baik kecamatan Ciputat maupun kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan termasuk daerah pemekaran baru yang mungkin belum sempat menata dan mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan. Kegiatan Pokja I yang sudah berjalan adalah Posyandu Lansia, kegiatan ini lebih aktif dilaksanakan oleh PKK di luar kompleks dibanding dengan yang berada di luar kompleks perumahan. Sedangkan kegiatan PAUD dilaksanakan oleh PKK yang berlokasi di luar kompleks perumahan, sementara di dalam kompleks tidak ada. Kondisi ini disebabkan karena pengurus PKK kompleks perumahan relatif sudah berusia lanjut atau sudah pensiun, sementara pengurus PKK luar kompleks relatif bervariasi dan kebanyakan merupakan keluarga-keluarga atau pasangan muda, selain juga ada yang berprofesi sebagai guru TK. Menurut penjelasan Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciputat, menggerakkan PKK perumahan memang lebih sulit, mungkin karena mereka pada umumnya memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau merasa lebih 'pintar'.

Kelompok kerja (Pokja) PKK yang sudah terbentuk dan terlaksana di kecamatan Ciputat dan kecamatan Pondok Aren adalah Pokja I, Pokja II, Pokja III, dan Pokja IV (kesehatan). Kegiatan yang sudah berjalan di masing-masing Pokja adalah: melaksanakan pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, dan santunan anak yatim piatu serta bimbingan belajar dan TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an). Di kecamatan Pondok Aren belum diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti halnya di kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Namun atas prakarsa ketua PKK, di kecamatan Pondok Aren telah terbentuk suatu Yayasan yang dikelola oleh Pokja II dengan tujuan memberikan santunan atau bantuan beasiswa kepada anak-anak warga yang kurang mampu, untuk tingkat Sekolah Dasar.

Kegiatan PKK ini bagi beberapa anggota dirasa cukup menyita waktu, tetapi mereka umumnya menyatakan senang dapat aktif dalam berbagai kegiatan itu karena pekerjaan ini mulia dan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, PKK di Kecamatan Pasar Minggu mampu memberdayakan anggotanya dalam bentuk ikut berpartisipasi dalam pengumpulan data KB, sensus kependudukan, kesehatan, pengumpulan dana kematian tingkat RW, sampai pengurusan kartu Gakin (Keterangan Keluarga Miskin) bagi warga yang tidak mampu berobat ke RS.

PENUTUP

Dari uraian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan yang tidak bekerja atau pensiunan. Agar organisasi PKK dapat menjadi media pemberdayaan dan kemitrasejajaran perempuan dengan laki-laki, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi anggota PKK, perlu diberikan pelatihan: keterampilan menyuluh bagi kader-kader Posyandu, keterampilan berkomunikasi; pembuatan laporan; dan peningkatan kemampuan mengajar bagi anggota yang menjadi guru PAUD.
2. Bagi Pemerintah Daerah, perlu memberikan kesempatan kepada perempuan anggota PKK untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengalokasikan dana untuk membantu pengembangan PKK. Kesemuanya harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

REFERENSI

- Biro Pemberdayaan Perempuan. (2007). *Pembangunan pemberdayaan perempuan*. Diambil 3 Pebruari 2009, dari <http://www.sumutprov.go.id/skp/bioperemper/index.php?option=...Kebijakan>.
- Caren. (2009). *Jender & MDGs*. Katalog Asian Development Bank. Diambil 3 Pebruari 2009, <http://www.adb.org/Documents/Periodical>.
- Irawan, P. (1999). *Logika dan prosedur penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Ihromi, T.O. et al (2000). *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ihromi, T.O. (1995). *Kajian wanita dalam pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 10 Program Pokok PKK. (2007). Diambil 3 Pebruari 2009, dari <http://www.selatan.jakarta.go.id/pkk/index.php?option=com-content&task>.
- Ruswiati-Suryasaputra, (2005). *Hak perempuan dalam mensukseskan millenium developmat goal 2015*, Makalah dipresentasikan pada Dialog Santun Organisasi Wanita Padang, 24 Maret 2005.

Sejarah PKK. Mei 2007. Diambil 3 Pebruari 2009, dari <http://pkk.cilacapkab.go.id/index.php/10programpokok>.

Situs Resmi Tim Penggerak PKK Pusat, (2008). Diambil 30 Juni 2009, dari <http://www.tppk.or.id>.